

IMPLEMENTATION OF PLANNING FAMILY PROGRAMS (KB) FOR MEN IN
VILLAGE NIPAH RIVER AN SIANTAN MEMPAWAH DISTRICT

by
REGINAWATI¹
E1011151122

Drs. Sukamto, M.Si², Dr. Ir Hj. Ida Rochmawati, M.Si²
e-mail: Reginawatiregina@gmail.com

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the factors that influence the implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village of Siantan Subdistrict of Mempawah Regency. Judging from its identification, it shows low participation of men in the use of vasectomy contraception. This research focuses on the influencing factors. The formulation of the problem in this study is why the implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village of Siantan Subdistrict of Mempawah Regency has not been running optimally. This research uses a qualitative approach in the type of exploratory research. The research subjects in this study consisted of: Sungai Nipah Village Office, particularly the Village Head and Sungai Nipah Village Secretary, the Health Office, Population Control and Family Planning, especially the Head of Population Control and Family Planning Section, Family Planning Field Staff of Siantan Subdistrict and the community in Sungai Nipah Village. Data collection techniques were carried out by using in-depth interviews, observation and documentation. The results of the study show that there are still obstacles in implementing the male family planning program consisting of 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Suggestions in connection with the results of this study are: it is expected for the implementers to improve the quality of work so that the objectives can be achieved.

Keywords: Implementation of Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) BAGI PRIA
DI DESA SUNGAI NIPAH KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN
MEMPAWAH**

Oleh:

Reginawati ^{1*}

NIM. E1011151122

Drs. Sukamto, M.Si², Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si²

*Email: Reginawatiiregina@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Dilihat dari identifikasinya adalah masih rendahnya kesertaan pria dalam penggunaan kontrasepsi vasektomi. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria Di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yakni eksploratif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Kantor Desa Sungai Nipah khususnya Kepala Desa dan Sekretaris Desa sungai nipah, Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana khususnya Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Siantan dan masyarakat yang ada di Desa Sungai Nipah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program KB pria terdiri dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sarannya sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi implementor untuk meningkatkan kualitas kerja agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.

Kata Kunci : Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

A. PENDAHULUAN

Di negara-negara berkembang khususnya Indonesia banyak menggalakkan berbagai program khususnya yang berkaitan dengan kebijakan mengurangi kemiskinan. Dari sekian banyak program yang ada, yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan program kesehatan yang juga menggalakkan program Keluarga Berencana guna mengurangi angka fertilitas yang ada, banyak kendala yang di alami oleh Negara ini tidak terlepas oleh permasalahan kependudukan yang cukup kompleks mulai dari angka kelahiran yang tinggi dan juga angka kematian ibu akibat melahirkan yang juga tinggi.

Keluarga berencana merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Program keluarga berencana merupakan bagian program pembangunan nasional di Indonesia yang sudah mulai sejak masa awal pembangunan lima tahun (1969) yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan ibu dan anak dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dengan cara pengaturan kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan hasil dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo pada Tahun 1990, program KB mengalami perubahan paradigma yaitu dari pendekatan pengendalian populasi menjadi pendekatan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Sejalan dengan perubahan ini program KB di Indonesia juga mengalami perubahan yang diperkuat dan di tetapkannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Diamanatkan pada pasal 25 ayat 1 yaitu suami dan/ atau istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan KB. Perubahan paradigma ini menuntut adanya perubahan program terutama dengan menjamin kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi yang lebih baik dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan serta peningkatan partisipasi pria.

Vasektomi atau MOP adalah metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran sperma (kanan dan kiri) sehingga pada waktu senggama cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma. Efektivitas vasektomi dalam mencegah kehamilan mencapai 99,9%. (BKKBN, 2018).

Berdasarkan data peserta KB aktif di Desa Sungai Nipah khususnya apabila dilihat dari partisipasi pria untuk kontrasepsi MOP atau Vasektomi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 950 dan jumlah peserta MOP sebanyak 9 orang. Dan pada tahun 2018 jumlah pasangan usia subur (PUS) meningkat yakni sebanyak 956 namun meningkatnya pasangan usia subur tidak disertai dengan meningkatnya peserta MOP yang berjumlah 9 orang juga. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada

peningkatan tiap tahunnya.

Permasalahan berikutnya dalam pelaksanaan program KB di Desa Sungai Nipah adalah kurangnya sosialisasi program KB pria kepada masyarakat hal ini yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yg tidak mengetahui adanya program KB bagi pria berupa MOP atau vasektomi. Selain itu, sumberdaya manusia di Desa Sungai Nipah ini juga kekurangan unsur pelaksana atau implementor dalam hal ini berkaitan dengan tidak tersedianya dokter ahli untuk menangani KB vasektomi dan sumberdaya fasilitas ditinjau tidak adanya fasilitas kesehatan dalam melayani masyarakat untuk berKB vasektomi. Tidak hanya itu saja pada aspek disposisi unsur pelaksana diterjemahkan dengan kurang berkomitmen dan kejujuran pada implementasi kebijakan dan kurangnya dukungan dari implementor dengan adanya KB pria karena menganggap bahwa yang melakukan KB hanya wanita atau istri saja, serta terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan prosedur pada struktur

birokrasi.

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KB bagi pria di Desa Sungai Nipah yang belum berjalan secara maksimal. sehingga dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa implementasi program keluarga berencana bagi pria di Desa Sungai Nipah belum berjalan secara maksimal ? Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program KB bagi pria di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KB bagi pria di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Manfaat teoritis yakni ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam Ilmu Administrasi Publik pada kajian kebijakan publik khususnya pada implementasi program Keluarga Berencana bagi pria di Desa Sungai Nipah. Manfaat lain dari penelitian ini dapat dijadikan referensi

yang berguna kepada masyarakat/pembaca untuk menjadi dasar pemikiran dalam memahami teori implementasi kebijakan. dan Manfaat praktis:

1. Penelitian ini dapat bermanfaat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah untuk penulis sendiri selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
2. Dapat menjadi bahan masukan bagi implementor dan seluruh pihak yang berkaitan dalam implementasi suatu kebijakan khususnya program keluarga berencana bagi pria di Desa Sungai Nipah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. (dalam Dye, Suntoro Irawan & Hariri Hasan, 3, 2015) memberikan definisi kebijakan publik secara luas , yakni sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Dengan

kata lain, kebijakan publik apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah melainkan termasuk juga apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Senada dengan Easton (dalam Edward III dan Sharknky, Suntoro Irawan & Hariri Hasan, 4, 2015) mengartikan kebijakan publik sebagai berikut “ *is what governments say and do, or not do, it is the goals or purpose of government programs*” Dengan kata lain, kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Dalam pengertian ini bahwa kebijakan publik dapat ditetapkan dengan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato

pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Menurut George C Edward III (dalam Budi Winarno 2013:177) studi implementasi adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplmentasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Edwards, oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan

bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-

hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

3. Disposisi atau Kecendrungan

Kecendrungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsistensi penting bagi

implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Dalam beberapa kasus, karena sifat dari kebijakan serta sifat dari sistem pengadilan, seringkali suatu kebijakan dilaksanakan oleh yurisdiksi yang lain. Hal ini berakibat pada semakin terbukanya interpretasi terhadap kebijakan terhadap kebijakan yang dimaksud dan bila hal ini benar-benar terjadi maka akan berakibat pada semakin sulitnya implementasi kebijakan, sebab interpretasi yang terlalu bebas terhadap kebijakan akan mempersulit implementasi yang

efektif dan besar kemungkinan implementasi yang dijalankan menyimpang dari tujuan awalnya. Mengingat pentingnya kecenderungan-kecenderungan ini bagi implementasi kebijakan yang efektif, maka perlu disini dibahas dampak bagi dari kecenderungan-kecenderungan tersebut terhadap implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu kebijakan tertentu.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan gejala social tertentu berdasarkan data dan fakta. Kemudian menceritakan dan menggambarkan suatu obyek secara rinci dan mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode pendekatan yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.

Sugiyono (2011, 15) mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci.

Sedangkan ditinjau dari tujuan, penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Asumsi peneliti menggunakan penelitian eksploratif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas

tentang apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama yang terjadi dalam implementasi undang-undang no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang permasalahan adalah permasalahan yang tampak, dan harus di kaji lebih mendalam untuk itu peneliti tertarik menggali lebih dalam berkaitan dengan kondisi, fakta serta permasalahan yang terjadi dalam Implementasi program keluarga berencana (KB) di Desa Sungai Nipah . Oleh karena itu, penulis memilih jenis penelitian eksploratif guna menggambarkan fenomena atau masalah yang terjadi dalam masyarakat.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Terkait dengan data yang diperlukan peneliti sebagai studi penelitian, wilayah, atau lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu di Desa Sungai Nipah. Adapun beberapa pertimbangan yang mendorong penulis

memilih di lokasi tersebut adalah dimana Program Keluarga Berencana telah dicanangkan, khususnya pada Desa Sungai Nipah yang menjadi fokus implementasi program Keluarga Berencana tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2019.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam bukunya Faisal (2005, 109) mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau kesatuan (kasus) yang diteliti. Pemilihan subjek penelitian dilakukan penulis dengan menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan mencari informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, atau mungkin informan tersebut merupakan penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan-informan yang memberi informasi mengenai situasi dan kondisi berkaitan dengan

penelitian atau masalah yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode purposive dalam menentukan subjek yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang akurat. Nama dan jabatan yang tertera berikut ini merupakan orang-orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

1. Aparatur Pemerintah Desa Sungai Nipah (Kepala Desa) dan Sekretaris Desa.
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.
3. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.
4. Masyarakat Desa Sungai Nipah.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik observasi, penulis berada diantara objek penelitian untuk mengamati secara langsung fenomena maupun keadaan yang nyata yang ada dilapangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati secara langsung

bagaimana implementasi program keluarga berencana (KB) bagi pria di Desa Sungai Nipah.

2. Teknik wawancara, penulis mengadakan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap informan kunci sebagai sumber data. Pertanyaan yang diajukan berkaitan erat dengan bagaimana pelaksanaan program KB bagi pria di Desa Sungai Nipah.
3. Teknik dokumentasi, penulis memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan alat berupa kamera. Dengan menggunakan alat dokumentasi tersebut banyak aspek pengamatan dapat didokumentasikan dengan lebih sempurna dan penulis dapat berulang kali mengamati dengan seksama.

5. Analisis Data

1. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut

Lexy J. Moleong (2017, 330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu”. Denzin (dalam Lexy J. Moleong, 2017, 330) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. sebenarnya dilapangan, maka penulis melakukan uji validitas dari data yang perlu di uji dengan uji kredibilitas data dengan melakukan triangulasi. Triangulasi terdiri dari tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang

telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data, maksudnya dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, maksudnya yaitu pengecekan kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Pada triangulasi sumber ini penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini penulis bertujuan melakukan *check and recheck*. hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui kebenaran data dengan menyatakan pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda.

2. Teknik Analisis data

Menurut Sugiyono (2017, 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data di lapangan menurut Miles dan Huberman dalam Sugioyo (2017, 243) analisis terbagi menjadi tiga alur kegiatan yaitu :

1. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Verifikasi, langkah ketiga analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti telah diungkapkan dalam

tujuan penelitian pada Bab I, dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program KB bagi pria dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KB bagi pria di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

Untuk itu terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan data serta informasi yang penulis dapatkan selama melaksanakan penelitian di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik

mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Pada Bab I dibagian latar belakang penelitian telah dikemukakan bahwa implementasi program KB bagi pria di Desa Sungai Nipah belum berjalan secara maksimal. Dilihat dari data yang bersangkutan yakni data hasil pencapaian peserta aktif media operasi pria (MOP) atau vasektomi di Kecamatan Siantan Tahun 2017-2018. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kesertaan pria dalam melakukan KB. Berdasarkan data peserta KB aktif di Desa Sungai Nipah Khususnya apabila dilihat dari partisipasi pria untuk kontrasepsi MOP atau Vasektomi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 950 dan jumlah peserta MOP sebanyak 9 orang. Dan pada tahun 2018 jumlah pasangan usia subur (PUS) meningkat yakni sebanyak 956 namun meningkatnya pasangan usia subur tidak disertai dengan meningkatnya peserta MOP

yang berjumlah 9 orang juga. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan tiap tahunnya.

Jenis KB pria ini ternyata masih dapat dikatakan kurang berhasil jika dibandingkan dengan jenis KB untuk wanita, hal ini ditunjukkan dengan jumlah kesertaan pria yang relatif masih rendah. Rendahnya angka partisipasi pria dalam ber-KB ini disebabkan oleh berbagai faktor. Didalam pelaksanaannya selalu menghadapi berbagai macam permasalahan seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi.

Faktor lain yang peneliti temukan dilapangan adalah masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui adanya KB pria berupa MOP atau vasektomi hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh unsur pelaksana atau implementor. Tidak hanya itu sumber daya manusia atau sumber daya fasilitas dalam hal ini berkaitan dengan keberadaan fasilitas kesehatan dan dokter untuk melayani KB ini tidak ada di desa sungai nipah

sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut, Selain itu kurangnya dukungan unsur pelaksana (implementor) dengan adanya KB pria yang menganggap bahwa KB itu hanya diperuntukkan bagi wanita atau istri saja serta terbatasnya petugas lapangan KB yang tidak mencapai standar pelayanan minimum (SPM) menyebabkan kinerjanya menjadi tidak efektif. Hal inilah yang mengakibatkan program KB pria di Desa Sungai Nipah belum berjalan secara maksimal.

Dari pernyataan diatas penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian di Desa Sungai Nipah dengan alasan bahwa implementasi program KB pria belum berjalan secara maksimal. Maka dari itu, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan implementasi program KB pria.

Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan fokus observasi. Fokus observasi yakni pada pola atau teknik pengawasan

yang dilakukan masing-masing unsur pelaksana atau implementor dalam melaksanakan program KB pria. Observasi dilakukan guna untuk melihat tugas dan tanggung jawab implementor dalam suatu program apakah sudah dilaksanakan atau belum. Data hasil observasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih. Kemudian didapatlah data dan informasi yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KB pria di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pada implementasi program KB pria di Desa Sungai Nipah masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan implementasi program,

KB itu belum berjalan secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Komunikasi sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa seluruh pelaksana sudah melaksanakan sosialisasi tentang program ini dan kelompok sasaran program KB pria sudah mendapatkan sosialisasinya. Hanya saja program KB belum disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat Sungai Nipah, sehingga belum dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya pria dalam berKB. Sosialisasi yang tidak efektif disebabkan oleh minimnya dukungan pedoman dari implementor yang mengakibatkan motivasi implementor kurang untuk melaksanakan kebijakan KB pria yang ada. Kolaborasi antara pemerintah dan institusi masyarakat juga dibutuhkan dalam membantu untuk mensosialisasikan program KB Pria. Selama ini pemerintah hanya mengarahkan dan mengkoordinir Dinas atau Instansi, PLKB dan kader, padahal kader itu tenaga sukarela.

Seharusnya untuk pemberian informasi dan hal-hal lain diharapkan ada kolaborasi / perpaduan, kerjasama, kemitraan antara pemerintah dan para kader serta institusi lokal karena selama ini kolaborasi tersebut belum tampak.

2. Sumberdaya implementasi KB pria kurang didukung dengan sumberdaya yang memadai, terutama dalam hal sumberdaya yang berkaitan dengan tidak tersedianya fasilitas kesehatan atau faskes di Desa Sungai Nipah menjadi penyebab utamanya. Selain itu tidak adanya dokter ahli yang telah mempunyai sertifikat dan telah mendapat pelatihan dalam menangani pasien KB Vasektomi ditingkat kabupaten dan tidak tersedianya alat-alat yang dibutuhkan.

3. Komitmen pelaksana program atau implementor dari jajaran pemegang kebijakan di Desa Sungai Nipah masih kurang baik. Disposisi (sikap) implementor program KB pria kurang menunjukkan motivasi terhadap KB pria, itu terlihat pada tindakan yang dilakukan dalam mensosialisasikan hanya sebagai pengganti dan tidak ada

inisiatif untuk menambah partisipasi pria untuk berKB, karena implementor sendiri ada yang kurang mendukung program ini. Selama ini, sikap para penerima program dalam hal ini pria, masih tergolong kurang baik. Sebagian besar masih enggan menerima program yang ada dikarenakan mereka tidak benar-benar memahami manfaat MOP itu sendiri. Mereka masih menilai bahwa MOP itu buruk. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat terhadap program adalah sikap yang negatif. Sebagian besar dari mereka menolak adanya MOP.

4. Terbatasnya jumlah pelaksana di lapangan yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) menghambat tingkat efektivitas suatu proses berjalannya program KB pria di Desa Sungai Nipah. Program KB pun masih belum maksimal dalam pelaksanaannya karena ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan prosedur pada struktur birokrasi.

B. Saran

1. Bersamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka di harapkan kepada unsur pelaksana atau implementor untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam mengimplementasikan program KB bagi pria di Desa Sungai Nipah. Hal itu bisa dilakukan dengan memperbaiki apa saja yang menjadi kendalanya program KB pria tersebut tidak berjalan dengan maksimal yaitu berkaitan dengan Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan struktur birokrasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya.2015.*Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Pustaka Setia
- Agustino Leo, 2014 *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabetha
- Bkkbn. 2018. *Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (Pedoman Bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan)*
- Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Masyhuri & Zainuddin.2011.*Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : PT Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.

- Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Mulyadi Deddy, 2016 *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung Alfabetha
- O Jones Charles ,1996 *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Patilima, Hamid.2011.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, Agus Erwan & Sulistyastuti Dyah Ratih.2015. *Implementasi Kebijakan Publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta : Gava Media
- Riduwan.2010.*Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK dari administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta. Calpulis
- Subarsono. AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Suntoro, Irawan & Hariri Hasan.2015.*Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suryabrata, Sumadi. 2014. *Metodologi Penelitian*.Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Tachjan, 2006 *Implementasi Kebijakan Publik* Bandung .AIPI
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : PT. Buku Seru

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

SUMBER DARI SKRIPSI

- Yani, 2017. “Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Pria di Desa Lingga Kecamatan Sungai ambawang Kabupaten Kuburaya”. Skripsi Universitas Tanjungpura.
- Susanto Eka Hariyanti. 2014. “Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria Di Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau”. Skripsi Universitas Tanjungpura
- Pratama, Al Gunawan. 2016. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Keluarga Berencana Bagi Pria (Vasektomi) Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak”. Skripsi Universitas Tanjungpura.